



Negara untuk meningkatkan nasionalisme dan ketahanan ideologi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia

Dadang Sunendar¹, Yuliawan Kasmahidayat², Syaifullah³
^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
dadangsunendar@upi.edu¹

ABSTRACT

Pekerja Migran Indonesia (PMI) are Indonesian citizens who work abroad to meet their economic needs and contribute to the national economy. This article discusses efforts to enhance nationalism and ideological resilience among PMI in Malaysia, particularly in Johor Bahru, focusing on strengthening their understanding of rights and obligations as Indonesian citizens. This study used a qualitative approach with a case study method to gather information through interviews, observations, and document analysis. The results indicate that outreach and advocacy activities conducted by various parties, including the Consulate General of the Republic of Indonesia and the Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), positively impact PMI's understanding of their rights and strengthen their sense of nationalism. However, challenges still exist, such as the lack of involvement from relevant stakeholders in providing training on professional skills for PMI. The implications of this study emphasize the importance of closer collaboration between the government, educational institutions, and related organizations to enhance PMI's awareness, knowledge, and skills as responsible citizens of Indonesia.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 22 Aug 2024
Revised: 4 Dec 2024
Accepted: 9 Dec 2024
Available online: 16 Dec 2024
Publish: 27 Dec 2024

Keywords:

advocacy; citizenship; migrant workers; nationalism; Pekerja Migran Indonesia

Open access

Jurnal Abmas
is a peer-reviewed open-access journal

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Artikel ini membahas upaya peningkatan nasionalisme dan ketahanan ideologi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, khususnya di Johor Bahru, dengan fokus pada penguatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Dalam metodologi penelitian ini, pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali informasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan advokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), memberikan dampak positif terhadap pemahaman PMI mengenai hak-hak mereka serta memperkuat rasa kebangsaan mereka. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terkait kurangnya keterlibatan pihak terkait dalam penyuluhan tentang keterampilan profesional PMI. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan PMI sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Kata Kunci: advokasi; kewarganegaraan; nasionalisme; pekerja migran; Pekerja Migran Indonesia

How to cite (APA Style)

Sunendar, D., Kasmahidayat, Y., & Syaifullah, S. (2024). Negara untuk meningkatkan nasionalisme dan ketahanan ideologi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. *Jurnal Abmas*, 24(2), 135-144.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.



Copyright

2024, Dadang Sunendar, Yuliawan Kasmahidayat, Syaifullah. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: dadangsunendar@upi.edu

INTRODUCTION

Salah satu persoalan menyangkut Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat PMI) adalah masalah nasionalisme, yakni adanya kekhawatiran nasionalisme mereka mengalami penurunan akibat lama tinggal di negeri orang. Padahal mereka statusnya hanya sebagai pekerja, yang bisa saja mengalami pemutusan kerja, tergantung dari kebijakan majikannya. Sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tentu saja merupakan pilihan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya di Indonesia. Negara melalui kementerian terkait, terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, sudah barang tentu dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap PMI tersebut dari berbagai permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh PMI. Berdasarkan data BP2MI (2023) jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia sebanyak 5.660 (lihat <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juli-2023>) penempatan. Sedangkan jumlah PMI sebanyak 2,7 Juta menurut data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Posisi PMI sebagai warga negara yang berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara, harus diikuti dengan upaya meningkatkan kompetensi PMI baik pengetahuan, sikap dan keterampilan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan perannya sebagai tenaga kerja secara profesional. Di sisi lain, semangat kebangsaan, paham kebangsaan, dan rasa kebangsaan harus senantiasa mereka miliki sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sangat penting, meskipun mereka tinggal di luar negeri yang berprofesi sebagai tenaga kerja di luar negeri, harus tetap memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Peningkatan nasionalisme di kalangan PMI Malaysia sangat penting dimiliki sebagai wujud dari warga negara yang baik (*good citizenship*).

Berdasarkan Portal Data Ketenagakerjaan Kemnaker RI, tercatat sebanyak 1.666.912 tenaga kerja yang meningkat produktivitasnya di Indonesia. Sementara itu, menurut cnindonesia.com, antara Januari-Oktober 2023 tercatat 239.000 orang bekerja di luar negeri. Secara kuantitas mengalami peningkatan dari tahun 2022. Sejatinya, peningkatan kuantitas harus diikuti oleh peningkatan kualitas PMI, terutama dari segi keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan tuntutan kerja di era globalisasi dewasa ini. Ketentuan normatif tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pemerintah Indonesia, 2017). Setiap PMI, menurut UU tersebut akan mendapatkan perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah selesai menjalankan pekerjaannya. Perlindungan tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan atas hak dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai warga negara dan pekerja, serta menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Adapun hak PMI diatur secara rinci dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2017.

Sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri karena sedang bekerja, berdasarkan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan bela negara, sesuai dengan profesi yang disandanginya sebagai PMI. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah "Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara". Tidak terkecuali bagi PMI, harus melaksanakan bela negara sesuai dengan profesi mereka, secara baik dan bertanggungjawab. Dibandingkan dengan wilayah lainnya di Malaysia, negara bagian Johor Bahru memiliki jumlah PMI yang banyak. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan pemerintah untuk mendelegasikan perwakilannya melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru, dengan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada PMI di Johor Bahru ([Handoyo & Triarda, 2020](#)).

Salah satu permasalahan terkait PMI adalah pengetahuan dan pemahaman tentang Hak dan Kewajiban sebagai PMI yang masih belum memadai, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya perlindungan terhadap keberadaan PMI. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PMI yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Padahal, dalam konteks bela negara, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan profesi merupakan sebuah keniscayaan (*conditio sine qua non*) dalam berbagai bentuk aktivitas atau kegiatan

sebagai PMI (Sutra & Hadi, 2023). Bela negara dalam “Modul utama Pembinaan Bela Negara” oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional terdapat lima nilai yakni 1) cinta tanah air; 2) sadar berbangsa dan bernegara; 3) setia pada Pancasila dan ideologi negara; 4) rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 5) memiliki kemampuan awal bela negara.

Meskipun dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI terutama pada pasal 6 ayat (1) telah dikemukakan hak-hak PMI, namun secara jujur harus diakui belum semua PMI mengetahui dan memahami hak-hak PMI tersebut. Kondisi ini tentu sangat riskan, sebab akan memberi peluang kepada pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab untuk tidak memenuhi atau mengabaikan hak-hak PMI tersebut dengan berbagai alasan. Tentu saja dengan diabaikannya hak-hak PMI oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tempat PMI bekerja, akan berdampak terhadap jaminan kesejahteraan PMI yang akan terganggu. Kondisi inilah yang harus diantisipasi sedini mungkin, agar hak-hak PMI dapat dipenuhi dengan baik. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman PMI terhadap hak dan kewajiban sebagai wujud bela negara semakin diperparah oleh kurangnya keterlibatan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi untuk memberikan pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai PMI, memberikan penyuluhan terhadap hak dan kewajiban PMI. Dikhawatirkan dengan kurangnya kepedulian pihak-pihak terkait terhadap hak dan kewajiban PMI akan timbul kurang rasa percaya (*distrust*) kepada pemerintah Indonesia. Situasi inilah yang akan menurunkan semangat nasionalisme PMI kepada bangsa dan negaranya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penyuluhan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban PMI sebagai wujud bela negara untuk meningkatkan nasionalisme PMI di Johor Bahru.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UPI merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai wujud kepedulian UPI terhadap keberadaan PMI di Malaysia, khususnya di Johor Bahru. Urgensi kegiatan pengabdian ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hak dan kewajiban sebagai PMI sebagai wujud bela negara dalam rangka meningkatkan nasionalisme PMI di Johor Bahru. Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan PMI di Johor Baru, diperoleh informasi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh PMI dalam konteks bela negara untuk meningkatkan nasionalisme PMI terdiri atas 2 (dua) permasalahan yakni: 1) kurangnya pemahaman terkait hak dan kewajiban sebagai PMI sebagai wujud bela negara; dan 2) kurangnya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terkait pengetahuan hak dan kewajiban serta keterampilan sebagai wujud bela negara untuk meningkatkan nasionalisme PMI.

Literature Review

Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Dalam konstitusi negara yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada penjelasan Pasal 9 Ayat (1) dikemukakan pengertian bela negara adalah “Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara”. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa (Hapsari & Wahyuningtyas, 2023).

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional “Modul utama Pembinaan Bela Negara” disebutkan nilai-nilai dasar bela negara yakni: 1) Cinta Tanah Air; 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara; 3) Setia Kepala Pancasila sebagai ideologi negara; 4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara; 5) Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara; 6) semangat untuk mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Konsep Ideologi

Istilah ideologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “idea” dan “logos” yang berasal dari bahasa Yunani. Idea berarti ide atau gagasan, sedangkan logos berarti ilmu. Secara sederhana, ideologi dapat diartikan pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan atau gagasan (Ackerman & Burnham, 2021; Zmigrod, 2022). Sedangkan pengertian ideologi secara lebih luas adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara (Maulida et al., 2023; Mukaromah et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konsep ideologi terkandung: 1) Berisi prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara; 2) Menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara; 3) Memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dengan ideologi suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan masalah-masalah dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju. Dengan berpedoman pada ideologi, suatu bangsa memiliki pola dalam menyelenggarakan program pembangunan. Dalam suatu ideologi terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran yang terdalam, serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada dasarnya ideologi suatu bangsa adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya, serta menimbulkan tekad untuk diwujudkannya (Erkilic, 2021; Terec-Vlad, 2021). Ideologi suatu bangsa pada umumnya bersumber pada budaya dan pengalaman sejarah masyarakat yang menciptakan ideologi tersebut. Ideologi bangsa dinyatakan oleh para pendiri bangsa (*founding father*) suatu negara dan harus diwariskan kepada generasi penerus secara terus-menerus sehingga menjadi sikap hidup bagi masyarakat pendukungnya.

Pemahaman secara benar konsep ideologi tersebut diharapkan dapat mendorong kita untuk mengkaji secara utuh tentang makna ideologi terbuka. Dalam berbagai kepustakaan ditemukan berbagai rumusan tentang apakah ideologi itu sebenarnya, apa fungsi perannya, serta bagaimana kedudukannya dalam mempertahankan eksistensi sebuah bangsa. Rumusan tentang konsep ideologi tersebut sudah barang tentu sangat beraneka ragam atau bervariasi, baik secara redaksional maupun materi muatan dalam pengertian atau rumusan tersebut (Maulida et al., 2023; Ustuk & Yazan, 2024). Tentu saja hal ini tidak perlu dipermasalahkan, karena sekalipun pengertian ideologi tersebut bervariasi, namun jika dicermati secara mendalam sesungguhnya terkandung inti-inti kesamaan. Selain itu, pandangan tentang makna ideologi, yakni suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam, tentang bagaimana cara yang sebaiknya yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi.

Pengertian tersebut, tidak jauh berbeda dari pengertian ideologi yang dikemukakan Soerjanto Poespowardojo dalam Siregar (2014), yaitu sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Lebih lanjut ditegaskan bahwa ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi bukanlah sekadar pengetahuan teoretis belaka, melainkan merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam ideologi, dapat diidentifikasi sebagai: 1) Adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan (*reality*); 2) Memuat seperangkat nilai-nilai (*construct of values*) atau petunjuk untuk penuntun moral (*moral prescription*); 3) Memuat suatu orientasi pada tindakan (*action oriented*) atau suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Unsur ini disebut unsur retorika.

Berdasarkan rumusan-rumusan pengertian ideologi sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: 1) Ideologi mengandung gagasan, keyakinan, atau nilai-nilai mendasar dan mendalam; 2) Gagasan, keyakinan dan nilai-nilai tersebut tersusun secara sistematis sehingga membentuk suatu kebulatan secara menyeluruh; 3) Ideologi ini akan mendasari kehidupan bersama bagi suatu kelompok, golongan masyarakat atau bangsa; 4) Nilai, gagasan, sikap dalam ideologi itu bersifat khas; 5) Bila tidak diwaspadai dapat mengarah menjadi beku, kaku, tak berubah, dan tak berkembang

Setelah mengetahui pengertian ideologi sebagaimana diterangkan di atas, pertanyaan selanjutnya adalah apakah fungsi pokok ideologi tersebut bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada intinya suatu ideologi itu mendasari kehidupan suatu kelompok masyarakat, bangsa maupun suatu bangsa. Jadi dengan ideologi-lah kehidupan suatu kelompok, masyarakat, bangsa dan negara terarah, terkendali sehingga mampu mewujudkan apa yang hendak dicapai bersama dalam kehidupan bersama tersebut.

Soerjanto Poespowardojo mengemukakan fungsi-fungsi dari ideologi adalah sebagai: 1) Struktur kognitif, yakni keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya; 2) Orientasi dasar, dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia; 3) Norma-norma, yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak; 4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya; 5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. (6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta mempolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, ideologi juga berfungsi sebagai “*solidarity making*” dengan mengangkat berbagai perbedaan dalam tata nilai yang lebih tinggi. Kesimpulan dari pendapat di atas bahwa ideologi berfungsi, yaitu: 1) membentuk identitas kelompok; 2) mempersatukan; 3) mengatasi konflik; dan 4) solidaritas making (Siregar, 2014).

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara sehingga Pancasila berkedudukan sebagai ideologi bangsa dan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari negara lain.

Pancasila itu sendiri dapat diinternalisasikan dengan mengidentifikasi lebih banyak tentang perilaku atau karakter “kreatif” suatu bangsa dalam menata kehidupan sosial dan aktualisasinya untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan (Kasmahidayat, 2020). Proses internalisasi Pancasila ini mencakup penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kebersamaan, ke dalam kehidupan sehari-hari warga negara.

METHODS

Analisis permasalahan yang diangkat dalam kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena kegiatan ini berusaha menggali informasi secara mendalam melalui wawancara didukung dengan observasi dan analisis dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada perwakilan PMI, staf kedutaan, atase pendidikan dan kebudayaan di Johor Bahru sebagai sumber primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui observasi dan berbagai dokumen terkait dengan PMI yang mendukung untuk kepentingan analisis data PKM.

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Hasil pengumpulan data di lapangan menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya konkrit untuk meningkatkan PMI di Johor Bahru antara lain (1) memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia, (2) memberikan layanan optimal kepada PMI salah satunya advokasi, dan (3) mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan pengalaman masing-masing. Edukasi tentang hak dan kewajiban

sebagai WNI sangat penting dilakukan agar sebagai warga negara senantiasa terpanggil untuk memberikan darma baktinya kepada bangsa dan negara sesuai statusnya sebagai PMI (Uksan, 2022). Meskipun PMI tinggal di luar negeri, secara emosional tidak terbantahkan bahwa perasaan mereka tidak akan pernah lepas dari lubuk hati mereka, kemudian mengambil dan mengamalkan nilai-nilai karakter kebangsaan yang terkandung pada apa saja yang mereka lakukan selama di luar negeri (Youpika et al., 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa identitas dan rasa cinta tanah air tetap melekat kuat pada diri para PMI, meskipun mereka berada jauh dari kampung halaman. Mereka tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga terus mempraktikkan nilai-nilai yang mencerminkan budaya dan kebangsaan Indonesia. PMI juga memainkan peran penting dalam memelihara dan mempromosikan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang memperkuat ikatan kebangsaan kemudian melestarikan bahasa daerah sebagai wujud penghormatan terhadap keragaman budaya, dan menguasai bahasa asing untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global (Sunendar et al., 2024). Dengan cara ini, PMI berperan penting dalam menjaga dan memperkenalkan identitas bangsa Indonesia di kancah internasional. Terlebih manakala berkumpul di antara PMI dalam suatu acara baik yang diinisiasi oleh mereka sendiri maupun oleh pihak kedutaan RI, maka perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai wujud dari nasionalisme warga negara Indonesia muncul berlipat ganda.

Acara yang diinisiasi oleh sesama PMI biasanya bersifat non formal, sehingga suasana lebih cair, lebih akrab, dan lebih dekat, sehingga tampak sebagai satu keluarga besar PMI. Momentum ini menurut para PMI dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman dan informasi seputar status mereka sebagai PMI. Terutama informasi-informasi terkini yang terjadi di tanah air baik dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Meskipun informasi hal tersebut bisa diakses melalui media sosial, namun tetap saja mereka ingin mendapatkan berbagai informasi yang relatif lebih lengkap dan lebih kekinian. Para PMI menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit berita bohong atau hoaks bermunculan di berbagai media tentang Indonesia yang terkesan mendiskreditkan Indonesia di mata internasional.

Ketika berbagai berita itu mengemuka baik secara langsung maupun melalui media sosial, para PMI menyikapinya secara proporsional dengan cara melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Hal ini dilakukan agar informasi yang tidak benar terkait bangsa dan negara Indonesia menyebar secara masif sehingga menimbulkan impresi negatif di kalangan PMI sendiri maupun masyarakat tempat PMI bekerja. Pihak KBRI dan KJRI bekerja sama dengan tim pelaksana PKM internasional LPPM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) beserta pihak-pihak lainnya, khususnya pegiat perlindungan PMI telah, sedang, dan akan terus melaksanakan kegiatan advokasi kepada para PMI melalui berbagai kegiatan yang konstruktif. Waktu pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan waktu para PMI yang memiliki kesibukan masing-masing sesuai rutinitas di rumah majikannya masing-masing.

Salah satu bentuk kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disingkat PKM) yang dilakukan dari tanggal 23 hingga 26 Mei 2024. Beberapa pihak yang terkait antara lain 12 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Forum LPPM ALPTKNI (Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia). Bentuk kegiatan dari tim LPPM UPI adalah “Penyuluhan Bela Negara untuk Meningkatkan Nasionalisme Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Dari hasil penyuluhan diperoleh informasi, khususnya dari para PMI, bahwa mereka masih memerlukan pendampingan terkait dengan berbagai aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Hasil penyuluhan bidang budaya diperoleh pemahaman terkait hak dan kewajiban PMI sebagai wujud rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, PMI juga berkomitmen untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang bisa dijadikan khazanah pewarisan budaya di masa yang akan datang. Selain itu para PMI juga memperoleh pengetahuan hak dan kewajiban serta keterampilan khususnya dalam penerapan bela negara (Sunendar & Permadi, 2023).



Gambar 1. Tim UPI bersama Forum LPPM ALPTKNI
Sumber: Dokumentasi Penulis 2024

Kehadiran serta dukungan negara khususnya pihak KJRI serta berbagai pihak terkait khususnya dalam kegiatan dalam **Gambar 1**, memberikan advokasi kepada PMI merupakan perwujudan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, karena negara kita adalah negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional yang harus melindungi warganya termasuk yang bekerja di luar negeri, di antaranya sebagai PMI. Jaminan konstitusional tersebut tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.



Gambar 2. Konsul Jendral Johor Bahru (Sigit Suryantoro Widiyanto) saat memberikan sambutan dan pembukaan kegiatan Forum LPPM ALPTKNI, di kantor KJRI
Sumber: Dokumentasi Penulis 2024

Apabila negara tidak hadir dalam memberikan perlindungan kepada WNI sebagai PMI, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai *Failed State*, atau negara gagal (Hanifah, 2020). Tentu hal ini tidak dikehendaki oleh kita semua. Karenanya semua pihak harus berkolaborasi dalam memberikan advokasi kepada PMI agar mereka memiliki nasionalisme dan ketahanan ideologi yang mantap.

Discussion

Dalam upaya meningkatkan nasionalisme dan ketahanan ideologi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Johor Bahru, hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait telah melaksanakan berbagai upaya penting untuk mendukung para PMI. Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, menyediakan layanan optimal seperti advokasi, dan mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan pengalaman. Hal ini mencerminkan pentingnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai bagian dari bela negara. Meskipun pekerja migran tinggal di luar negeri, ikatan emosional mereka dengan tanah air tetap kuat, dan mereka berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mereka (Nourpanah, 2021; Soare & Tufis, 2023). Bahkan, banyak dari mereka yang berusaha mempraktikkan karakter kebangsaan dalam interaksi mereka di lingkungan internasional, seperti melestarikan bahasa Indonesia dan budaya daerah, serta memperkenalkan nilai-nilai tersebut di luar negeri.

Meskipun terdapat upaya nyata dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban PMI, masih terdapat beberapa tantangan dalam hal penguatan nasionalisme di kalangan PMI. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dalam memberikan penyuluhan yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan profesi mereka. Selain itu, meskipun banyak pegawai migran yang merasa bangga sebagai diaspora dan berusaha menjaga identitas kebangsaan mereka, informasi yang mereka terima sering kali tidak lengkap atau terkadang mengandung berita bohong yang dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap negara (Belloni, 2021). Oleh karena itu, kegiatan advokasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi sangat krusial dalam membekali PMI dengan pengetahuan yang benar dan relevan. Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, universitas, dan organisasi perlindungan PMI, perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa PMI dapat menjalankan peran mereka sebagai warga negara yang baik, baik di dalam maupun luar negeri.

CONCLUSION

PMI di luar negeri sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti penyuluhan dan advokasi yang difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), menunjukkan dampak positif. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesadaran PMI tentang hak mereka tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme mereka, meskipun mereka tinggal di luar negeri. Keberadaan PMI yang tetap menjaga identitas budaya Indonesia dan berkontribusi pada promosi bahasa Indonesia di luar negeri menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam menjaga nama baik bangsa Indonesia. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kebutuhan akan penyuluhan yang lebih terarah mengenai hak, kewajiban, dan keterampilan mereka dalam melaksanakan peran sebagai tenaga kerja profesional. Diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi yang peduli dengan perlindungan PMI untuk memastikan bahwa PMI dapat terus menjalankan tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia yang baik, menjaga nasionalisme, dan berkontribusi pada kemajuan negara.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Ackerman, G. A., & Burnham, M. (2021). Towards a definition of terrorist ideology. *Terrorism and Political Violence*, 33(6), 1160-1190.
- Belloni, M. (2021). Remittance houses and transnational citizenship: Mapping Eritrea's diaspora-state relationships. *Africa Spectrum*, 56(1), 59-80.
- Erkiliç, T. A. (2021). A study on the effects of ideologies on education and management in the context of basic concepts of political philosophy. *Osmangazi Journal of Educational Research*, 8(1), 259-285.
- Handoyo, B. S., & Triarda, R. (2020). Problematika pendidikan di perbatasan: Studi kasus pendidikan dasar bagi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Bahagian Sarawak, Malaysia. *Transformasi Global*, 7(2), 201-213.
- Hanifah, I. (2020). Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hapsari, A. M., & Wahyuningtiyas, A. A. F. (2023). Student action in defending the country upholding Pancasila values. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(2), 58-63.
- Kasmahidayat, Y. (2020). Tor-tor dance learning through Melayu aesthetics comprehension for students in Indonesian schools in Bangkok. *International Conference on Arts and Design Education*, 2(1), 156-158.
- Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The essence of Pancasila as the foundation and ideology of the state: The values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*, 1(2), 95-102.
- Mukaromah, S. A., Gusmawan, A., & Munandar, J. (2022). The lunge of global ideologies: The challenges of Pancasila ideology education in the middle of global existence in the era of globalization. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, 4(1), 1-30.
- Nourpanah, S. (2021). The construction of gratitude in the workplace: Temporary foreign workers employed in health care. *International Migration*, 59(2), 57-71.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107-112.
- Soare, S., & Tufiş, C. D. (2023). Saved by the Diaspora? The case of the alliance for the Union of Romanians. *European Political Science*, 22(1), 101-118.
- Sunendar, D., & Permadi, T. (2023). Kajian seni pertunjukan wayang Wong Cirebon Lakon Sumantri Ngender dalam nilai pendidikan melalui pembelajaran sastra. *Jurnal Ekonomi Teknologi dan Bisnis (JETBIS)*, 2(1), 185-191.
- Sunendar, D., Hardini, T. I., & Racmadhany, A. (2024). Digital natives students' perception on development of application "Trigatra" in Indonesia. *International Conference on Language, Literature, Culture, and Education*, 7(1), 78-83.
- Sutra, H., & Hadi, S. (2023). Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia Non prosedural dalam perspektif HAM. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 449-460.

- Terec-Vlad, L. (2021). The role of ideology in nation building. *Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty Section: Political Sciences and European Studies*, 7(1), 37-45.
- Uksan, A. (2022). Edukasi karakter bangsa untuk pekerja migran Indonesia, suatu strategi kontra radikalisisasi dan confidence-building measures. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(3), 42-69.
- Uştuk, Ö., & Yazan, B. (2024). Tensions in an identity-oriented language teaching practicum: A dialogic approach. *Tesol Quarterly*, 58(1), 363-393.
- Youpika, F., Sumiyadi, Permadi, T., Sunendar, D., & Yandryati, J. (2024). The endangered central Malay folklore: A medium for internalizing character values in Indonesian language and literature. *International Journal of Language Education*, 8(1), 48-63.
- Zmigrod, L. (2022). A psychology of ideology: Unpacking the psychological structure of ideological thinking. *Perspectives on Psychological Science*, 17(4), 1072-1092.